

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahan merupakan perwujudan dari ruang yang menjadi tempat tinggal bagi manusia. Ruang adalah permukaan bumi, baik yang ada di atasnya maupun yang ada di bawahnya sepanjang manusia masih bisa menjangkaunya (Tarigan, 2005). Aktivitas manusia semakin bertambah sejalan dengan kebutuhan lahannya. Luas lahan akan selalu tetap sedangkan kebutuhan penduduk akan meningkat pesat seiring dengan jumlah penduduk yang selalu meningkat maka perlu dilakukan penataan ruang agar tidak mengganggu lingkungan. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam pola alokasi investasi yang bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selain itu penataan ruang juga bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penataan ruang diharapkan dapat mengefisienkan pembangunan dan meminimalisasi konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

Pertumbuhan penduduk yang pesat merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya peningkatan kebutuhan lahan. Jumlah penduduk di Kecamatan Jogonalan mengalami perkembangan positif dari tahun ke tahun. Luas wilayah Kecamatan Jogonalan adalah 2670 Ha, dengan desa terluas adalah Desa Tambakan seluas 261 Ha, sedangkan desa dengan wilayah terkecil adalah Desa Sumyang seluas 79 Ha. Jumlah penduduk Kecamatan Jogonalan yang mencapai 58.692 jiwa pada tahun 2013 tertarik untuk menekuni bidang pertanian. Pertumbuhan penduduk diikuti dengan persaingan dalam penggunaan lahan baik untuk keperluan produksi pertanian maupun untuk keperluan non pertanian. Penggunaan lahan di Kecamatan Jogonalan masih didominasi lahan sawah yaitu sebesar 59% dari luas total kecamatan, sedangkan sisanya berupa lahan bukan sawah (Kecamatan Jogonalan Dalam Angka, 2013). Perubahan penggunaan lahan

yang timbul akibat dari pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perkembangan wilayah. Adapun jumlah dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah dan kepadatan penduduk di Kecamatan Jogonalan tahun 2013

| No | Tahun | Luas (km ²) | Jumlah Penduduk | Kepadatan/km ² |
|----|-------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | 2013 | 26,7 | 58892 | 2198 |
| 2 | 2011 | 26,7 | 58402 | 2187 |
| 3 | 2012 | 26,7 | 58115 | 2177 |
| 4 | 2010 | 26,7 | 57877 | 2168 |
| 5 | 2009 | 26,7 | 57824 | 2166 |

Sumber: Kecamatan Jogonalan dalam Angka, 2014

Perubahan penggunaan lahan dari lahan sawah menjadi lahan bukan sawah di Kecamatan Jogonalan tahun 2013 tiap desa dapat dilihat dari tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2 Perkembangan Penggunaan Lahan Per Desa Kecamatan Jogonalan tahun 2013

| NO | Desa | Lahan Sawah (Ha) | Lahan Sawah (%) | Bukan Lahan Sawah (Ha) | Bukan Lahan Sawah (%) | Jumlah (Ha) |
|----|--------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | Somopuro | 108 | 58,38 | 77 | 41,62 | 185 |
| 2 | Titang | 75 | 65,79 | 39 | 34,21 | 114 |
| 3 | Tangkisanpos | 68 | 70,83 | 28 | 29,17 | 96 |
| 4 | Rejoso | 85 | 66,93 | 42 | 33,07 | 127 |
| 5 | Gondangan | 62 | 59,05 | 43 | 40,95 | 105 |
| 6 | Bakung | 79 | 63,71 | 45 | 36,29 | 124 |
| 7 | Ngering | 103 | 69,59 | 45 | 30,41 | 148 |
| 8 | Pakahan | 74 | 54,41 | 62 | 45,59 | 136 |
| 9 | Sumyang | 52 | 65,82 | 27 | 34,18 | 79 |
| 10 | Karang Dukuh | 75 | 65,79 | 39 | 34,21 | 114 |
| 11 | Plawikan | 72 | 57,14 | 54 | 42,86 | 126 |
| 12 | Kraguman | 101 | 68,24 | 47 | 31,76 | 148 |
| 13 | Granting | 81 | 72,97 | 30 | 27,03 | 111 |
| 14 | Prawatan | 121 | 57,35 | 90 | 42,65 | 211 |
| 15 | Wonoboyo | 91 | 61,90 | 56 | 38,10 | 147 |
| 16 | Dompyongan | 104 | 44,83 | 128 | 55,17 | 232 |
| 17 | Joton | 108 | 52,43 | 98 | 47,57 | 206 |
| 18 | Tambakan | 124 | 47,51 | 137 | 52,49 | 261 |

Sumber : Kecamatan Jogonalan Dalam Angka, 2014

Tabel 1.3 Perkembangan Penggunaan Lahan Kecamatan Jogonalan tahun 2009 -2013

| NO | Tahun | Lahan Sawah (Ha) | Lahan Sawah (%) | Bukan Lahan Sawah (Ha) | Bukan Lahan Sawah (%) | Jumlah (Ha) |
|----|-------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2013 | 1583 | 59,29 | 1087 | 40,71 | 2670 |
| 2 | 2012 | 1587 | 59,44 | 1083 | 40,56 | 2670 |
| 3 | 2011 | 1587 | 59,44 | 1083 | 40,56 | 2670 |
| 4 | 2010 | 1588 | 59,48 | 1082 | 40,52 | 2670 |
| 5 | 2009 | 1592 | 59,63 | 1078 | 40,37 | 2670 |

Sumber : Kecamatan Jogonalan Dalam Angka, 2014

Berdasarkan data penggunaan lahan di atas di Kecamatan Jogonalan dari tahun 2009 sampai 2013 penggunaan lahan bukan sawah meningkat 9 hektar yang dirinci terdiri dari sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah teknis, dan sawah dengan irigasi sederhana. Sebagian besar lahan sawah di Kecamatan Jogonalan berupa lahan sawah irigasi setengah teknis yaitu sebesar 48%, kemudian lahan sawah irigasi teknis sebesar 45%. Sawah irigasi teknis berpotensi sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang tersebar di Desa Tangkisanpos, Rejoso, Gondangan, Bakung, Ngering, Pakahan, Sumyang, Karangdukuh, Plawikan, Kraguman, Granting, dan Prawatan. Lahan sawah irigasi teknis terluas terdapat di Desa Ngering seluas 103 Ha. Perbandingan luas lahan sawah menurut jenis irigasi di Kecamatan Jogonalan, sebagian besar merupakan sawah setengah teknis dengan persentase sebesar 48%. Kemudian dengan persentase 45% merupakan sawah teknis. Sedangkan luas sawah yang paling kecil yaitu sawah sederhana yang sebesar 7%. Lahan kering di Kecamatan Jogonalan terdiri dari bangunan dan halaman; tegalan, kebun, ladang; dan lain-lain. Sebagian besar lahan kering berupa lahan bangunan dan halaman/ pekarangan yaitu seluas 803 Ha atau sebesar 74% dari luas total kecamatan. Dapat disimpulkan penggunaan lahan di Kecamatan Jogonalan dari tahun 2009 sampai 2013 atau dalam kurun waktu empat tahun mengalami perubahan penggunaan lahannya khususnya penggunaan lahan bukan sawah.

Perubahan penggunaan lahan harus memperhatikan perencanaan penggunaan lahan (alokasi pemanfaatan ruang) yang berkelanjutan. Perencanaan

alokasi pemanfaatan ruang disusun dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RDTR ditetapkan dalam ketetapan pemerintah yang berkekuatan hukum dan diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007. Kabupaten Klaten telah mempunyai rencana umum tata ruang berupa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031. Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten, setiap wilayah memiliki potensi dengan prioritas pengembangan yang berbeda dari berbagai aspek baik pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi, dan daya dukung lingkungan yang memerlukan perencanaan lebih detail dalam pemanfaatan secara optimal dan berdaya guna. Untuk menyelaraskan dengan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Klaten, diperlukan suatu rencana rinci yang merupakan penjabaran dari RTRW dan berfungsi mengatur dan menata kegiatan fungsional berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Kecamatan Jogonalan merupakan salah satu kecamatan yang berpotensi mengalami perkembangan secara fisik maupun non fisik. Perkembangan fisik yang dimaksud, yaitu pertumbuhan daerah terbangunan, sedangkan perkembangan non fisik yaitu perkembangan sosial-ekonomi. Kecamatan Jogonalan adalah sebagai kecamatan pusat pelayanan kawasan (PPK), yaitu kawasan perkotaan yang melayani kecamatan yang bersangkutan serta beberapa kecamatan sekitarnya, seperti pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, serta pertanian. Selain itu perkembangan Kecamatan Jogonalan dikarenakan kecamatan ini terletak diantara Kecamatan Prambanan yang memiliki obyek wisata potensial dan Perkotaan Klaten sebagai pusat perkotaan Kabupaten Klaten, serta dilalui jalan arteri primer Klaten-Jogjakarta yang mempunyai potensi sebagai penggerak perekonomian kawasan yang dilalui.

Permasalahan yang terjadi di kecamatan jogonalan Pengembangan potensi wisata yang memanfaatkan bekas pabrik gula sekarang tempat ini dibuat untuk kepentingan wisata yang disebut “Gondang Winangoen”, pengembangan kawasan peruntukan industri menengah dan kecil/ mikro dan pengembangan kawasan

peruntukan perdagangan jasa yang belum maksimal, meskipun lokasi sangat strategis karena berada di pinggir jalan arteri yang menghubungkan Jogja-Solo.

Posisi strategis ini yang menyebabkan Kecamatan Jogonalan memiliki tingkat aksesibilitas yang mendukung untuk dikembangkan sebagai permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas-fasilitas umum lainnya. Perkembangan Kecamatan Jogonalan secara fisik harus diimbangi dengan pengawasan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang tetap seimbang. Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang merupakan kegiatan mengamati dengan cermat, menilai tingkat pencapaian rencana secara obyektif, dan memberikan informasi hasil evaluasi secara terbuka (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007).

Perkembangan penataan ruang di Kecamatan Jogonalan tahun 2013-2018 dianalisis dan dievaluasi dengan perbandingan bentuk pemanfaatan ruang pada Rencana Detail Tata Ruang tahun 2013 dengan pemanfaatan ruang terbaru tahun 2014. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang aktual terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Jogonalan serta untuk mengetahui jenis penyimpangan penataan ruang. Jenis penyimpangan yang dianalisis pada penelitian ini adalah penyimpangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang telah direncanakan.

Perkembangan data penginderaan jauh juga dapat membantu dalam menganalisis penataan ruang dengan data kesesuaian pemanfaatan ruang terbaru dari peta dasar tahun 2014 terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Jogonalan didapatkan dari hasil analisis SIG berupa overlay (tumpang-susun) dengan menggunakan metode Intersect. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penataan Ruang Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Jogonalan Tahun 2013-2018.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian ini ada beberapa pertanyaan dalam penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2013-2014 terhadap Rencana Detail Tata Ruang tahun 2013-2018 Kecamatan Jogonalan?
2. Bagaimana jenis penyimpangan pemanfaatan ruang tahun 2013-2014 terhadap Rencana Detail Tata Ruang tahun 2013-2018 Kecamatan Jogonalan?

1.3 Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- 1 Mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2013-2014 terhadap Rencana Detail Tata Ruang tahun 2013-2018 Kecamatan Jogonalan, dan
- 2 Mengevaluasi jenis penyimpangan pemanfaatan ruang tahun 2013-2014 terhadap Rencana Detail Tata Ruang tahun 2013-2018 Kecamatan Jogonalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1 Diharapkan dapat digunakan untuk memantau perkembangan dan penataan ruang Kecamatan Jogonalan dalam hal pemanfaatan ruangnya, dan
- 2 sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan perencanaan lebih lanjut terhadap operasional pengelolaan penataan ruang Kecamatan Jogonalan.

1.5 Telaah Pustaka

1.5.1 Lahan

Lahan merupakan perwujudan dari ruang yang menjadi tempat tinggal bagi manusia. Ruang adalah permukaan bumi, baik yang ada di atasnya maupun yang ada di bawahnya sepanjang manusia masih bisa menjangkaunya (Tarigan, 2005). Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaanya (UU No. 26 Tahun 2007). Pemanfaatan ruang dalam penelitian ini diwakilkan oleh penggunaan lahan.

1.5.2 Perubahan Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah segala campur tangan manusia baik secara permanen maupun secara siklus terhadap suatu kumpulan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhannya baik material maupun spiritual ataupun keduanya (Malingreau, 1978).

Perubahan penggunaan lahan yang mewakilkan perubahan pemanfaatan ruang membawa dampak perkembangan kota yang merupakan suatu proses perubahan keadaan dari waktu ke waktu, baik yang menyangkut perluasan maupun pemekaran kota. Gejala ini merupakan proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar yang disebut urban sprawl (Hadi Sabari Yunus, 1978). Pemekaran kota adalah kenampakan luar dari perkembangan yang terjadi dalam kota, pemekaran kota itu sendiri merupakan hasil dari proses kehidupan yang terjadi dalam kota. Perluasan dan pemekaran kota tergantung pada empat faktor, yaitu : (1). Jumlah penduduk, (2). Penguasaan terhadap lingkungan alam, (3). Tingkat kemajuan teknologi, (4). Perkembangan organisasi sosial (Bintarto, 1977).

Perubahan penggunaan lahan yang merupakan imbas dari perluasan dan pemekaran kota dapat dipelajari dengan menggunakan suatu pendekatan, salah satunya menggunakan pendekatan dengan analisa keruangan (spatial analysis). Analisa keruangan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan lahan baik macam perubahan maupun lokasi perubahannya. Secara teoritis dikenal tiga cara perkembangan dasar di dalam kota, yaitu:

1. Perkembangan Horisontal

Cara perkembangannya mengarah ke luar, artinya daerah bertambah, sedangkan ketinggian dan kuantitas lahan bangunan (*coverage*) tetap sama. Perkembangan dengan cara ini sering terjadi di pinggir kota, di mana lahan masih mempunyai harga lebih murah dan dekat dengan jalan raya yang mengarah ke kota (di mana banyak keramaian).

2. Perkembangan Vertikal

Cara perkembangannya mengarah ke atas, artinya daerah pembangunan dan kuantitas lahan terbangun tetap sama, sedangkan ketinggian bangunan-bangunan bertambah. Perkembangan dengan cara ini sering terjadi di pusat kota (di mana harga lahan mahal) dan di pusat-pusat perdagangan yang memiliki potensi ekonomi.

3. Perkembangan Interstisial

Cara perkembangannya dilangsungkan ke dalam, artinya daerah dan ketinggian bangunan-bangunan rata-rata tetap sama, sedangkan kuantitas lahan terbangun (*coverage*) bertambah. Perkembangan dengan cara ini sering terjadi di pusat kota dan antara pusat dan pinggiran kota yang kawasannya sudah dibatasi dan hanya dapat dipadatkan.

1.5.3 Dinamika Perubahan lahan dan perencanaan wilayah

1.5.3.1 Pola Penggunaan Lahan di Perkotaan

Pola penggunaan lahan di kota-kota memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Reksohadiprodjo dan Karseno, 1981) :

1. Bahwa penggunaan lahan ditentukan oleh scale economies dan aglomerasi. Oleh karena itu cukup jarang ditemui sebuah tipe kota dengan bagian tengah yang kosong, melainkan justru bagian tengah padat dan bagian luar berkurang kepadatannya.
2. Bahwa orang lebih menyukai tempat-tempat yang dekat dengan semua lokasi kegiatan (sekolah, kerja, perbelanjaan, hiburan, dan lainnya) karena biaya perangkutan jelas tergantung pada jarak dan berbagai kesenangan.
3. Bahwa manusia juga tergantung pada sifat manusia sekitarnya, jika mereka orang baik-baik maka ia akan membayar lebih mahal untuk mendapatkan lingkungan tersebut. Menurut Lean dan Goodall, komponen penggunaan lahan dapat dikalsifikasikan dalam penggunaan lahan yang menguntungkan (profit uses of land) dan yang tidak menguntungkan (non profit uses of land).
 - a) Penggunaan lahan yang menguntungkan (profit uses of land)
Penggunaan lahan yang menguntungkan tergantung pada penggunaan lahan yang tidak menguntungkan. Hal ini disebabkan guna lahan yang

tidak menguntungkan tidak dapat bersaing secara bersamaan dengan lahan untuk fungsi yang menguntungkan. Guna lahan yang menguntungkan meliputi lahan untuk pertokoan, perumahan, industri, dan kantor bisnis tergantung pada penggunaan tanah untuk sekolah, rumah sakit, taman, tempat pembuangan sampah, dan sebagainya. Pengadaan sarana dan prasarana yang lengkap merupakan suatu contoh bagaimana guna tanah yang menguntungkan dari suatu lokasi dapat mempengaruhi guna tanah yang lain. Jika lahan digunakan untuk suatu tujuan dengan membangun kelengkapan/complementary untuk guna lahan lain disekitarnya, maka hal ini dapat meningkatkan profitabilitas (nilai keuntungan) secara umum, dan meningkatkan nilai lahan. Dengan demikian akan memungkinkan beberapa guna lahan bekerjasama meningkatkan keuntungan dengan berlokasi dekat dengan salah satu guna lahan yang profitable.

b) Penggunaan lahan yang tidak menguntungkan (non profit uses of land)
Penggunaan lahan yang paling tidak berorientasi untuk mencapai keuntungan adalah jalan, kecuali jalan tol, taman, aktifitas pendidikan, dan kantor pemerintahan. Perubahan kelas jalan dari jalan lokal/sekunder menjadi jalan primer akan mengakibatkan peningkatan penggunaan lahan di kedua sisinya yang cenderung pada penggunaan lahan yang menguntungkan.

1.5.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Lahan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Lahan Kota Menurut Soedarto dalam Wijayanti (1998) faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lahan perkotaan antara lain adalah :

1. Jumlah penduduk

Penggunaan lahan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh aktivitas dan jumlah penduduknya. Apabila jumlah penduduk dalam suatu wilayah besar, maka kepadatan rata-rata wilayah tersebut besar pula. Dengan jumlah penduduk yang besar, diperlukan ruang yang cukup luas untuk menampung segala aktivitas mereka. Bertambahnya jumlah penduduk

suatu wilayah akan bertambah pula ruang yang dibutuhkan. Bertambahnya keperluan akan ruang diperkirakan akan mengurangi luas lahan pertanian.

2. Jumlah APBD

Salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD merupakan biaya pembangunan di daerah. Besarnya APBD mendorong perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat.

3. Sarana Transportasi

Tingginya kepadatan penduduk dan harga lahan di pusat kota, mendorong penduduk untuk mencari alternatif lain dalam beraktivitas. Ketersediaan transportasi adalah salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi-lokasi aktivitas tersebut. Dengan kelancaran dan ketersediaan transportasi mendorong penduduk untuk beraktivitas diluar pusat kota yang relatif masih kosong.

4. Harga dasar tanah

Penggunaan suatu lahan diperkotaan dan faktor fisik serta pengembangan yang telah dilakukan terhadapnya, akan membentuk harga lahan suatu tanah. Jika unsur-unsur tersebut menunjang dan sesuai dengan kebutuhan aktivitas yang akan berlangsung diatasnya, maka harga tanah tersebut cenderung tinggi. Hal ini akan memicu pada penyesuaian aktivitas yang berlangsung diatasnya, termasuk terjadinya perubahan penggunaan lahan pada aktivitas yang lebih produktif agar sanggup untuk membayar tanah tersebut. Menurut Raharjo (dalam Widyaningsih, 2001), ada beberapa variabel yang berpengaruh dalam proses perkembangan kota, yaitu :

1. Penduduk; keadaan penduduk, proses penduduk, lingkungan sosial penduduk.
2. Lokasi yang strategis, sehingga aksesibilitasnya tinggi.
3. Fungsi kawasan perkotaan, merupakan fungsi dominan yang mampu menimbulkan perkembangan yang cepat, secara internal dan eksternal.
4. Kelengkapan fasilitas sosial ekonomi yang merupakan faktor utama timbulnya perkembangan dan pertumbuhan pusat kota.

5. Kelengkapan sarana prasarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk ke segala arah.
6. Faktor kesesuaian lahan.
7. Faktor kemajuan dan peningkatan bidang teknologi, yang mempercepat proses pusat kota mendapatkan perubahan yang lebih maju.

1.5.3.3 Macam – macam pandangan dalam perencanaan wilayah

Macam – macam pandangan dalam perencanaan wilayah menurut Jayadinata (2001) Tata guna tanah di pedesaan di Indonesia dipengaruhi juga oleh globalisasi itu. Misalnya, untuk menarik modal asing di berbagai wilayah dibuat kawasan industri yang luas oleh pemerintah dengan surat keputusan gubernur sehingga tanah pertanian berubah menjadi kawasan industri atau kawasan perkotaan.

Pedesaan dan perkotaan merupakan bagian dari wilayah karena sebagaimana telah dibicarakan diatas, wilayah terjadi atas perdesaan dan kota (paling sedikit satu kota). Dengan demikian pembangunan wilayah memerlukan perencanaan wilayah secara keseluruhan (regional planning).

Perencanaan wilayah di berbagai negara tidak sama caranya, bergantung kepada kehidupan ekonomi dan kepada masalah yang dihadapi. Dalam perencanaan wilayah di Inggris misalnya, sebagai Negara industri, secara historis terdapat tiga macam perencanaan wilayah, yaitu :

1. Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya kepada masalah kota yang bersifat social.
2. Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya kepada wilayah yang penduduknya banyak menganggur dan dalam keadaan stagnasi industri.
3. Perencanaan wilayah yang memperhatikan wilayah pedesaan, dengan pengembangan tanah bagi sektor pertanian dan rekreasi.

Di negara berkembang perencanaan wilayah dihubungkan dengan pembangunan atau pengembangan wilayah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk wilayah tersebut.

1.5.4 Penataan Ruang

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang (Luthfi, 2013).

1. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana yang hasil rencananya akan ditinjau kembali dalam kurun waktu tertentu. Dalam proses penyusunannya, harus mempertimbangkan secara terpadu aspek-aspek kondisi fisik wilayah, potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum pertanahan keamanan, lingkungan hidup (daya dukung lingkungan), serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan geostrategi, geopolitik, dan geoeкономи. Perencanaan tata ruang meliputi perencanaan struktur dan pola tata ruang, kawasan strategis, tataguna lahan, tat guna air, tataguna udara, dan tata guna sumberdaya alam lainnya. Hasilnya adalah Rencana Tata Ruang (RTR)

2. Pemanfaatan Rencana Tata Ruang

Pemanfaatan tata ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang dilakukan dengan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, yang didasarkan atas rencana tata ruang. Yang dimaksudkan dengan pembiayaan program pemanfaatan ruang adalah mobilisasi, prioritas dan alokasi pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan.

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Tata Ruang

Dilakukan pengendalian yang meliputi kegiatan (1) pengawasan, (2) penertiban pemanfaatan ruang, dan (3) penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

1.5.5 Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTR)

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) merupakan rencana tata ruang di wilayah kabupaten/kota, yang menggambarkan zonasi/blok pemanfaatan ruang, struktur, dan pola ruang, sistem sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan tata ruang (Permendagri No.28 tahun 2008). Rencana struktur ruang adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan lain. Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Hirarki dan kedalaman rencana tata ruang dapat dilihat pada Tabel 1.3. Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) merupakan rencana atau kebijakan yang diputuskan oleh PERDA Kabupaten/Kota. Lingkup wilayah yang diatur dalam RDTRK meliputi sebagian wilayah atau seluruh wilayah administrasi kota atau beberapa kawasan tertentu dengan skala kedetilan minimal 1:5.000. Isi dari RDTRK meliputi kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kota, rencana struktur tingkat pelayanan, rencana sistem jaringan fungsi jalan, rencana sistem jaringan utilitas, rencana kepadatan bangunan lingkungan dan rencana ketinggian bangunan.

Tabel 1. 4 Hirarki dan kedalaman rencana tata ruang

| Macam Rencana | Penetapan | Lingkup Wilayah | Isi Rencana | Skala Peta |
|---------------|----------------------|--|--|---|
| RTRWN | Keputusan Presiden | Seluruh wilayah administrasi negara | - | 1:1000000 (skala minimal) |
| RTRWP | PERDA Propinsi | Seluruh wilayah administrasi propinsi | - | 1: 250.000 (skala minimal) |
| RTRWK | PERDA Kabupaten/Kota | Seluruh wilayah administrasi Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pengembangan kota - Rencana pemanfaatan ruang perkotaan - Rencana struktur tingkat pelayanan kota - Rencana sistem jaringan utilitas kota - Rencana pengembangan pemanfaatan air baku - Indikasi unit pelayanan kota - Rencana pengelolaan pembangunan | 1:100.000 (Kabupaten Diluar P.Jawa) 1:50.000 (Kabupaten Di P.Jawa) |
| RDTRK | PERDA Kabupaten/Kota | Sebagian atau seluruh wilayah administrasi kota/beberapa kawasan tertentu | <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pengembangan penduduk - Rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kota - Rencana struktur tingkat pelayanan - Rencana sistem jaringan fungsi jalan - Rencana sistem jaringan utilitas - Rencana kepadatan bangunan lingkungan - Rencana ketinggian bangunan | 1: 5.000 (skala minimal) |
| RTRK | PERDA Kabupaten/Kota | Sebagian/seluruh kawasan tertentu yang dapat merupakan satu/beberapa unit lingkungan perencanaan | <ul style="list-style-type: none"> - Rencana tapak penanganan lingkungan - Pra rencana pola dan kontruksi jaringan jalan - Rencana indikasi proyek | 1: 5.000 (skala minimal) |

Sumber : UU No.24 Tahun 1992.

1.5.6 Evaluasi dan Analisis Penyimpangan Penataan Ruang.

Evaluasi pemanfaatan ruang wilayah adalah tindakan mengamati dan mencatat kondisi struktur ruang dan pola ruang pada wilayah. Evaluasi pemanfaatan ruang yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pemanfaatan ruang terbaru dengan pemanfaatan ruang pada rencana detail tata ruang tahun 2013-2018. Lingkup wilayah yang menjadi objek pemantauan adalah wilayah yang merupakan batas wilayah administratif dan memiliki deliniasi wilayah yang sama dengan wilayah pada rencana tata ruang wilayah tersebut, dalam penelitian ini adalah Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten.

Evaluasi pemanfaatan ruang dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang terbaru terhadap rencana pola pemanfaatan ruang pada RDTR. Kesesuaian yang dihasilkan ada 3 kategori, yaitu belum sesuai, sesuai dan tidak sesuai. Belum sesuai apabila pembangunan belum terealisasi namun memiliki potensi untuk dibangun atau kondisi saat ini masih berupa kondisi sebelum disusun RDTR. Sesuai apabila kondisi di lapangan yang ada saat ini cocok dengan perencanaan yang terdapat pada RDTR. Tidak sesuai apabila kondisi di lapangan tidak sama dengan perencanaannya yang terdapat pada RDTR.

Kriteria tidak sesuai merupakan keadaan yang tidak sama dengan kondisi yang direncanakan sehingga disebut suatu penyimpangan terhadap RDTR. Penyimpangan (penyimpangan) penataan ruang adalah suatu kondisi yang digunakan untuk mengukur distorsi atau keadaan yang tidak sama dengan kondisi yang direncanakan (Peraturan Menteri PU, 2009). Informasi hasil simpangan diterjemahkan ke dalam rentang kualitatif.

1.6 Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang analisis peta untuk kajian penggunaan lahan dan rencana tata ruang yang pernah dilakukan diantaranya adalah :

Hutomo (2006), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penyimpangan Pemanfaatan Ruang Tahun 2005 Terhadap RUTRK Kota Kebumen Tahun 1987-2007”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data sekunder dan analisa peta dengan SIG. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu administrasi Kota Kebumen, dokumen RUTRK Kebumen tahun 1987-2007, data kependudukan tahun 1987 dan tahun 2005, dan data sosial ekonomi tahun 1987 dan tahun 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang paling dominan adalah sesuai dengan RUTRK yang ditetapkan yaitu sebesar 60,45%. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan berupa adanya hak status atas tanah, kelengkapan fasilitas dan kemudahan aksesibilitas serta kondisi topografi daerah penelitian yang potensial.

Turyadi (2009), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kemajuan Pencapaian Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Sewon Menggunakan Citra Satelit Quickbird”. Sumber data primer yang digunakan adalah Citra Satelit *Quickbird* tahun 2007 dan cek lapangan tahun 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis peta secara kualitatif. Komparasi dilakukan antara kondisi eksisting tahun 2009 dan kondisi yang direncanakan pada RDTRK tahun 2009 dengan bantuan analisis data menggunakan Sistem Informasi Geografi. Penelitian ini menghasilkan (1) nilai realisasi pemanfaatan ruang sebesar 72,21% selaras, 17,03% belum terealisasi, dan 10,76% tidak selaras. Dominasi ketidakselarasannya adalah peruntukan lahan pertanian pada blok no.7 sebesar 59,94% sebagian besar menjadi lahan rumah tinggal. (2) nilai realisasi kepadatan bangunan sebesar 23,97% selaras, 53,01% belum terealisasi, dan 23,01% tidak selaras, Dominasi ketidakselarasannya adalah peruntukan kepadatan bangunan sedang pada blok no.3 sebesar 68,27%, sebagian besar menjadi kepadatan tinggi. Dan (3) nilai realisasi struktur pelayanan kegiatan sebesar 8,43% selaras, 56,63% selaras fungsi, 9,64% belum terealisasi, dan 25,30% tidak selaras.

Fitriani (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penyimpangan Pemanfaatan Ruang Aktual Terhadap Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Ngaglik Tahun 2009-2018”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cek lapangan (*survei*) dan analisa peta (*intersection overlay*) menggunakan bantuan Sistem Informasi Geografis secara kualitatif.. Hasil penelitian menunjukkan Peta kesesuaian pemanfaatan ruang aktual terhadap RDTRK yang telah disusun, Peta penyimpangan pemanfaatan ruang, Tabel luasan kesesuaian pemanfaatan ruang, Tabel variasi jenis penyimpangan pemanfaatan ruang.

Perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1. 5 Perbandingan Penelitian-Penelitian Sebelumnya

| No. | Peneliti | Tahun | Judul | Tujuan Penelitian | Metode | Hasil Penelitian |
|-----|----------------------------|-------|---|---|--|---|
| 1. | Pri Hutomo | 2005 | Analisis Penyimpangan Pemanfaatan Ruang Tahun 2005 Terhadap RUTRK Kota Kebumen Tahun 1987-2007 | Mengetahui variasi jenis dan intensitas penyimpangan pemanfaatan ruang beserta faktor-faktor yang berpengaruh, mengetahui kecenderungan pola arah penyebarannya | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data sekunder dan analisa peta yang didukung cek lapangan | Pemanfaatan ruang paling dominan adalah sesuai dengan RUTRK yang ditetapkan yaitu sebesar 60,45%. |
| 2. | Turyadi | 2009 | Analisis Kemajuan Pencapaian RDTRK Kecamatan Sewon Menggunakan Citra Satelit <i>Quickbird</i> (Kasus Bagian Sewon Barat) | Menganalisis realisasi pemanfaatan ruang, kepadatan bangunan, dan struktur pelayanan kegiatan perkotaan pada tahun 2009 | Interpretasi Citra <i>Quickbird</i> tahun 2007, survei lapangan tahun 2009 dan komparasi peta | Nilai realisasi pemanfaatan ruang sebesar 72,21% selaras, 17, 03 % belum terealisasi, dan 10, 76% tidak selaras. Dominasi ketidakselarasannya adalah peruntukan lahan pertanian pada blok no.7 sebesar 59,94% sebagian besar menjadi lahan rumah tinggal. |
| 3. | Fitriani | 2013 | Analisis Penyimpangan Pemanfaatan Ruang Aktual Terhadap Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Ngaglik Tahun 2009-2018 | Mengetahui kesesuaian dari pemanfaatan ruang aktual terhadap Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Kecamatan Ngaglik Tahun 2009-2018, mengetahui variasi penyimpangan (penyimpangan) pemanfaatan ruang dan kecenderungan pola arah perubahan pemanfaatan ruang di Kecamatan Ngaglik ,mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi variasi penyimpangan(penyimpangan) pemanfaatan ruang di Kecamatan Ngaglik. | Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cek lapangan (<i>survei</i>) dan analisa peta (<i>intersection overlay</i>) menggunakan bantuan Sistem Informasi Geografis secara kualitatif. | *) Peta kesesuaian pemanfaatan ruang aktual terhadap RDTRK yang telah disusun, Peta penyimpangan pemanfaatan ruang, Tabel luasan kesesuaian pemanfaatan ruang, Tabel variasi jenis penyimpangan pemanfaatan ruang |
| 4. | Wijanarko Noor Imam Susilo | 2015 | Evaluasi Penataan Ruang Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Jogonolan Tahun 2013-2018. | Mengevaluasi kesesuaian penataan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang di Kecamatan Jogonolan tahun 2013-2014,dan mengevaluasi jenis penyimpangan (penyimpangan) penataan ruang di Kecamatan Jogonolan. | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode cek lapangan (<i>survei</i>) dari data sekunder instansi dan metode overlay untuk mengevaluasi penataan ruang kecamatan Jogonolan. | *) Peta kesesuaian penataan ruang Kecamatan Jogonolan dan Peta jenis penyimpangan penataan ruang Kecamatan Jogonolan, |

1.7 Kerangka Penelitian

Kegiatan manusia yang beragam memicu perubahan penggunaan lahan dalam suatu wilayah. Luas lahan yang tetap sedangkan jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan peningkatan jumlah aktifitas manusia untuk mempergunakan lahan namun keterbatasan ketersediaan lahan pada suatu wilayah maka perlu dilakukan penataan ruang yang sesuai dengan potensi suatu wilayah. Perubahan penggunaan lahan merupakan bentuk perkembangan dari suatu daerah secara fisik. Perkembangan fisik suatu daerah harus disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar memperhatikan karakteristik, fungsi dan kemampuan lahannya. Pengaturan bentuk penggunaan lahan atau penataan ruang dalam suatu Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dengan fungsi dari pemanfaatan ruang.

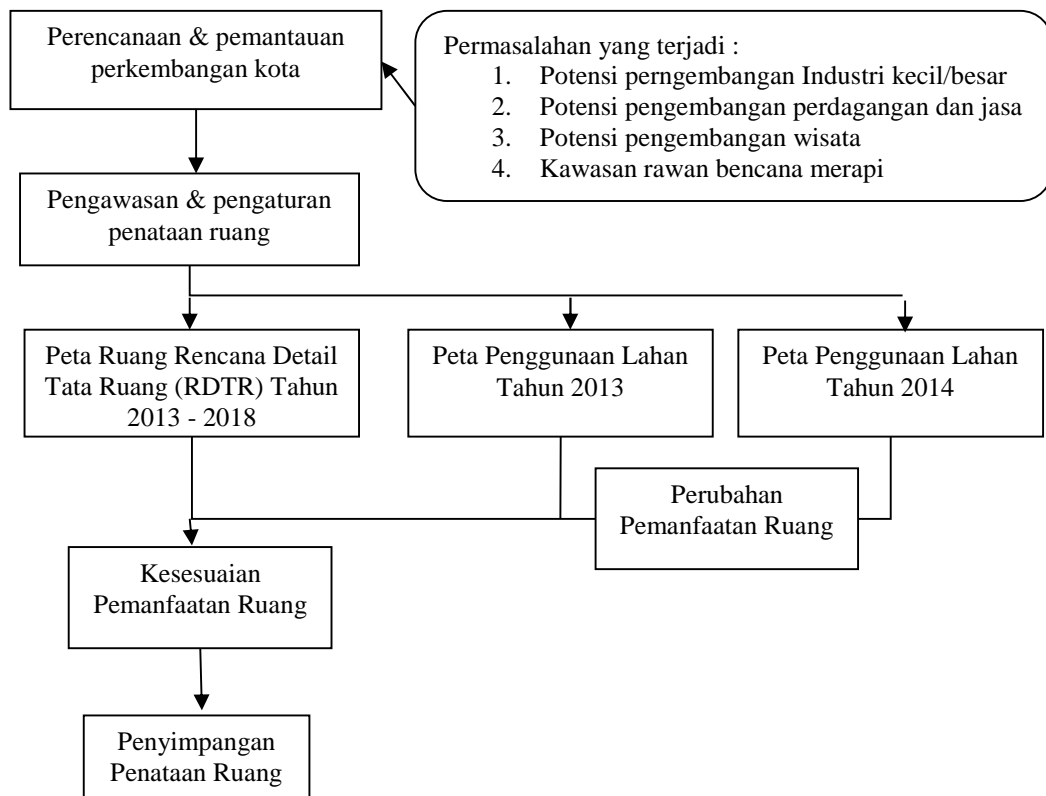
Perkembangan fisik Kecamatan Jogonalan tahun 2013-2014 dianalisis dengan perbandingan luasan setiap bentuk pemanfaatan ruang pada pemanfaatan ruang tahun 2013 dengan pemanfaatan ruang terbaru tahun 2014. Pengawasan penataan ruang dilakukan untuk menekan masalah yang berkaitan dengan tata ruang seperti penyimpangan pemanfaatan ruang terhadap RDTR sehingga perkembangan daerah dapat terkontrol. Penyimpangan pemanfaatan ruang merupakan kondisi terbaru yang tidak sama dengan kondisi yang direncanakan.

Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi pemanfaatan ruang terbaru dari rencana pola pemanfaatan ruang dalam RDTR 2013 - 2018. Metode evaluasi dilakukan dengan analisis peta dan metode cek lapangan untuk validasi (survei). Analisis peta diperoleh dari overlay pemanfaatan ruang perkotaan tahun 2014 dengan rencana pola pemanfaatan ruang dalam RDTR 2013 – 2018 yang diperoleh dari Bappeda.

Analisis peta dilakukan untuk menghasilkan evaluasi penataan ruang terhadap rencana detail tata ruang (RDTR) Kecamatan Jogonalan menggunakan bantuan Sistem Informasi Geografis. Kesesuaian yang dihasilkan ada 3 kategori, yaitu belum sesuai, sesuai dan tidak sesuai. Belum sesuai apabila pembangunan belum terealisasi namun memiliki potensi untuk dibangun. Sesuai apabila kondisi

di lapangan yang ada saat ini cocok dengan perencanaan yang terdapat pada RDTR. Tidak sesuai apabila kondisi saat ini tidak cocok dengan perencanaan yang terdapat pada RDTR.

Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : Peneliti 2015

Gambar 1.1

1.8 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode cek lapangan dari data sekunder instansi dan metode overlay untuk mengevaluasi penataan ruang kecamatan Jogonalan.

Metode survei dan sampling digunakan untuk mencocokkan antara data peta yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan serta untuk mengetahui tingkat akurasi data yang telah dilakukan. Penentuan titik sampel dilakukan guna mendapatkan titik koordinat dan untuk survei lapangan. Penentuan titik survei

dilakukan dengan menggunakan analisis persebaran dan luasan penggunaan lahan. Teknik yang digunakan dalam memilih titik sampel adalah *Purposive Sampling*.

Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan Software SIG dengan metode *overlay*, metode ini merupakan metode tumpang susun antara dua parameter penelitian sehingga menghasilkan informasi baru. Dalam penelitian ini parameter yang di *overlay* yaitu Peta Penggunaan Lahan Eksisting skala 1 : 5.000 tahun 2013 dan Peta Penggunaan Lahan Eksisting dari Peta RBI skala 1 : 5.000 tahun 2014 untuk mengetahui perubahan pemanfaatan ruang kemudian di *overlay* dengan Peta Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Jogonalan Tahun 2013-2018 untuk mengevaluasi kesesuaian Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Jogonalan. Selengkapnya uraian terinci metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.8.1 Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Jogonalan dipilih karena kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang berpotensi mengalami perkembangan secara fisik maupun non fisik sehingga penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jogonalan. Perkembangan fisik yang dimaksud, yaitu pertumbuhan daerah terbangunan, sedangkan perkembangan non fisik yaitu perkembangan sosial-ekonomi Kecamatan Jogonalan adalah sebagai kecamatan pusat pelayanan kawasan (PPK), hal tersebut yang mempengaruhi posisi Kecamatan menjadi daerah yang strategis untuk dijadikan pusat perkembangan wilayah. Posisi strategis Kecamatan Jogonalan dikarenakan Kecamatan ini terletak diantara dua kecamatan yang mempunyai perkembangan yang cukup besar, yaitu Kecamatan Prambanan sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata dan Perkotaan Klaten sebagai pusat perkotaan di Kabupaten Klaten, serta dilalui jalan arteri primer Klaten-Jogjakarta yang mempunyai potensi sebagai penggerak perekonomian kawasan yang dilalui. Hal ini menyebabkan Kecamatan Jogonalan memiliki aksesibilitas yang mendukung untuk dikembangkan permukiman, perdagangan dan jasa serta

fasilitas-fasilitas umum lainnya. Ketersediaan data yang mendukung penelitian ini juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan daerah penelitian.

1.8.2 Alat dan Bahan Penelitian

1.8.2.1 Alat

1. Laptop, dengan spesifikasi:
 - *Processor intel core i5 N550*
 - RAM 1GB DDR3, Hardisk 250 GB
2. *Software* pengolah data:
 - ArcGIS untuk pengolahan, *inputting* data, dan melakukan *layout* peta.
3. Software pendukung:
 - *Microsoft Office Word* untuk membuat laporan.
4. Printer Canon IP1980.
5. GPS untuk survei lapangan.
6. Kamera Digital untuk mengambil gambar sampel di lapangan.

1.8.2.2 Bahan

1. Peta Penggunaan Lahan skala 1:5.000 tahun 2014, sumber dari BAPPEDA Kabupaten Klaten,
2. Peta Penggunaan Lahan skala 1:5.000 tahun 2013, sumber dari BAPPEDA Kabupaten Klaten
3. Peta Pola Ruang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tahun 2013-2018, sumber dari BAPPEDA Kabupaten Klaten.

1.8.3 Data yang Dibutuhkan

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dan dapat digunakan untuk membantu pembuatan evaluasi penataan ruang pada daerah penelitian.

Tabel 1. 6 Jenis Data Sekunder, Sumber Data dan Kegunaanya

| No. | Jenis Data | Sumber Data | Kegunaan Data |
|-----|--------------------------------|---|---|
| 1. | Penggunaan Lahan | Peta pemanfaatan ruang skala 1:5.000 tahun 2013 dari BAPPEDA Klaten | Mengetahui data penggunaan lahan eksiting untuk di evaluasi |
| 2. | Penggunaan Lahan | Peta pemanfaatan ruang skala 1:5.000 tahun 2014 dari BAPPEDA Klaten | Mengetahui data penggunaan lahan eksiting untuk di evaluasi |
| 3. | Data rencana detail tata ruang | Peta Rencana Pola Pemanfaatan Ruang dalam Dokumen RDTR Kecamatan Jogonalan Tahun 2013-2018. | Analisis peta rencana pola pemanfaatan ruang |

Sumber : Penulis, 2015

1.8.4 Tahapan Penelitian

1.8.4.1 Tahapan Persiapan

Tahap persiapan dalam penelitian ini meliputi :

1. Studi Pustaka

Tahap ini dilakukan untuk dapat memahami mengenai teori yang digunakan dalam penelitian dari berbagai sumber yang ada, antara lain buku, artikel online, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penataan ruang. Pengetahuan mengenai daerah penelitian juga sangat mendukung agar tema yang diteliti sesuai dengan permasalahan yang ada pada saat ini.

2. Menyiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan sebagai informasi.

1.8.4.2 Tahapan Pengolahan Data

a. Cek Lapangan (*Survei*)

Cek lapangan dilakukan untuk menguji akurasi data peta pemanfaatan ruang tahun 2104 yang berasal dai instansi, sehingga dapat digunakan untuk uji validasi tahun 2015. Hasil cek lapangan dilakukan untuk mencocokkan antara data yang ada dengan keadaan sebenarnya dilapangan beserta dokumentasi bentuk pemanfaatan ruang di lapangan. Metode *survei* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *sampling* atau memilih obyek yang belum sesuai menurut RDTR. Cara pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*.

b. Overlay (tumpangsusun)

Proses tumpangsusun (*overlay*) dilakukan dengan metode *intersect*. *Overlay* dengan cara memilih tool overlay pada toolbox Analysis Tools. Didalam tool tersebut kemudian memasukkan data yang berupa peta-peta yang akan digabungkan. Dari hasil tumpangsusun tersebut akan didapatkan suatu unit pemetaan baru. Proses tumpangsusun untuk mengetahui perkembangan Kecamatan Jogonalan secara fisik dilakukan antara tiga peta, yaitu Peta Pemanfaatan Ruang dari data Rencana Detail Tata Ruang tahun 2013-2018, Peta pemanfaatan ruang Kecamatan Jogonalan tahun 2013 dan Peta pemanfaatan ruang Kecamatan Jogonalan tahun 2014. Beberapa syarat untuk melaksanakan tumpangsusun atau *overlay* antara lain yaitu skala harus sama yaitu 1: 5.000, daerah harus sama yaitu Kecamatan Jogonalan, dan menggunakan sistem koordinat yang sama yaitu UTM 49 *South*.

1.8.4.3 Tahapan Penyelesaian

Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kecamatan Jogonalan

Kegiatan evaluasi realisasi RDTR Kecamatan Jogonalan mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Dokumen RDTR Kecamatan Jogonalan tahun 2013 – 2018 yang menggunakan dasar Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Berbasis Sistem Informasi Geografis yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum N0.17/PRT/M/2009. Kesesuaian pemanfaatan ruang dibagi menjadi 3 yaitu belum sesuai, sesuai, dan tidak sesuai. Persentase kesesuaian dihitung dari jumlah setiap klas kesesuaian dibagi dengan jumlah luas keseluruhan Kecamatan Jogonalan (2670 Ha) dikalikan dengan 100%.

Kriteria sesuai apabila pemanfaatan ruang terbaru sesuai dengan pemanfaatan ruang rencana. Contohnya adalah sub blok yang dalam peruntukannya direncanakan sebagai lahan pemukiman, pada sebelum direncanakan lahan tersebut berupa sawah dan aktualnya lahan tersebut dibangun/dimanfaatkan untuk pemukiman. Contoh lainnya pada lahan yang sebelum direncanakan sudah berupa sarana pendidikan, direncanakan sebagai kebun campuran dan pada keadaan aktualnya berupa sarana pendidikan. Kriteria

sesuai juga termasuk pada pemanfaatan ruang yang dianggap sebagai pelengkap fasilitas pemanfaatan ruang, seperti jaringan jalan dan sungai. Cara perhitungannya adalah menghitung proporsi luas pemanfaatan aktual yang sesuai terhadap luas sub blok peruntukan.

$$\text{Sesuai} = \frac{(\text{luas pemanfaatan ruang yang sesuai} / \text{luas Kecamatan Jogonalan}) \times 100\%}{100\%}$$

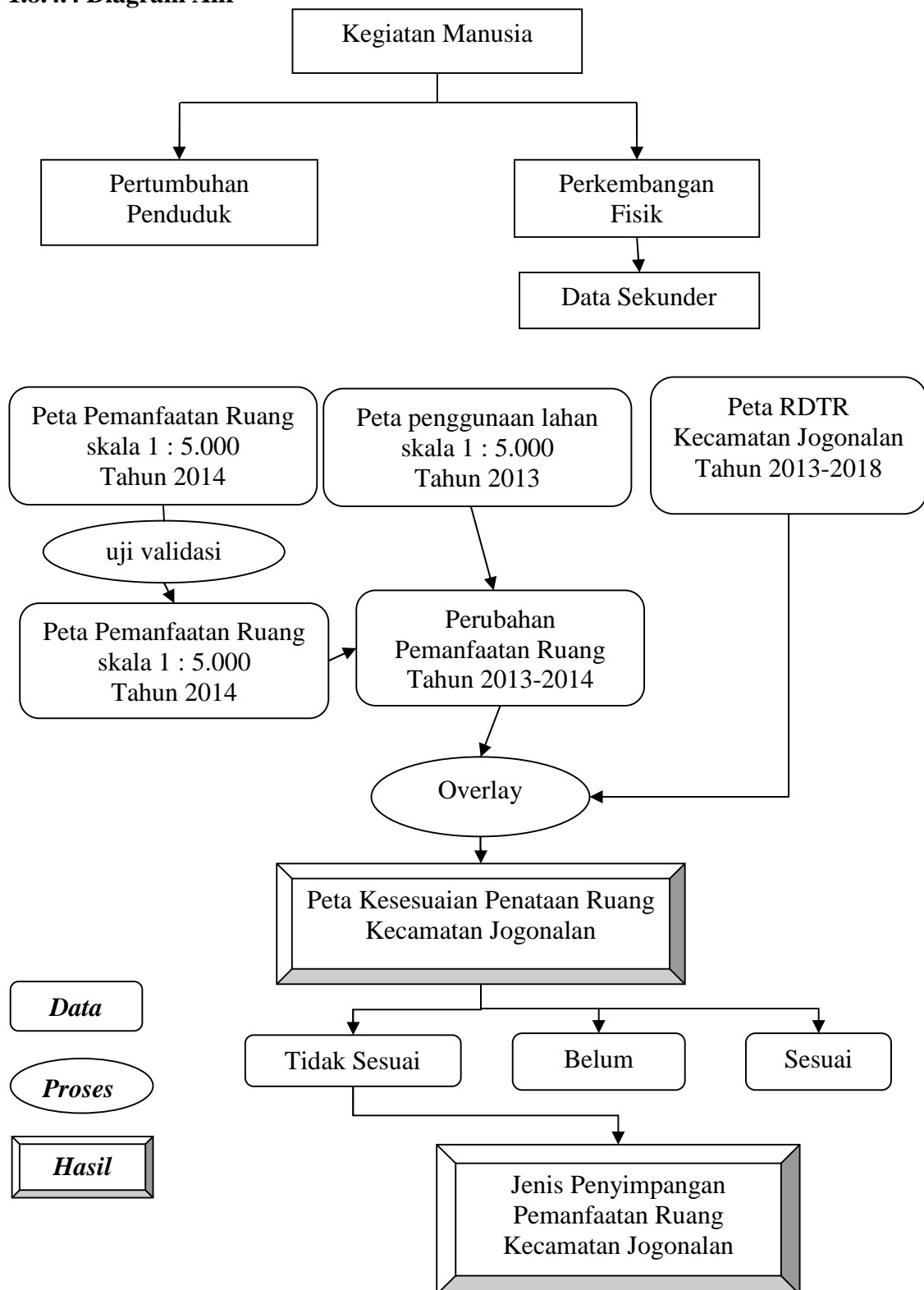
Kriteria belum terealisasi apabila pemanfaatan ruang terbaru belum terbangun atau masih berfungsi pemanfaatan ruang lain, tetapi merupakan tahapan perkembangan pemanfaatan ruang direncanakan atau berfungsi lain yang merupakan fungsi awal dari lahan sebelum direncanakan. Salah satu contoh pada lahan yang sebelum direncanakan berbentuk sawah, kemudian direncanakan sebagai pemukiman, namun pada aktualnya masih berupa sawah. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku pada RTH (Ruang Terbuka Hijau) untuk kegiatan olahraga berupa lapangan karena fungsinya yang merupakan fasilitas pemukiman.

$$\text{Belum Sesuai} = \frac{(\text{luas pemanfaatan ruang yang belum terealisasi} / \text{luas Kecamatan Jogonalan}) \times 100\%}{100\%}$$

Kriteria tidak sesuai apabila pemanfaatan ruang terbaru tidak sama atau berbeda dengan pemanfaatan ruang yang direncanakan. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku bagi lahan dengan pemanfaatan ruang terbaru yang berbeda dengan pemanfaatan ruang yang direncanakan namun pada sebelum direncanakan lahan tersebut sudah dimanfaatkan sama dengan pemanfaatan ruang terbaru nya. Contoh pemanfaatan ruang yang tidak sesuai pada lahan yang sebelum direncanakan masih berupa sawah, direncanakan sebagai sawah namun pada terbarunya dimanfaatkan sebagai industri.

$$\text{Tidak Sesuai} = \frac{(\text{luas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai} / \text{luas Kecamatan Jogonalan}) \times 100\%}{100\%}$$

1.8.4.4 Diagram Alir



Sumber : Peneliti 2015
Gambar 1.2

1.9 Batasan Operasional

1. **Evaluasi** adalah tindakan mengamati dan mencatat kondisi struktur ruang dan pola ruang pada suatu wilayah.
2. **Penataan Ruang** adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. **Perencanaan Tata Ruang** adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
4. **Pemanfaatan Ruang** adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
5. **Pengendalian Pemanfaatan Ruang** adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
6. **Penggunaan Lahan** adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan persil.
7. **Pola Ruang** adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. **Rencana Detail Tata Ruang** yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
9. **Perubahan penggunaan lahan** adalah suatu perubahan akan selalu membawa dampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang ada, baik langsung maupun tidak langsung, positif maupun negatif (Hadi Sabari Yunus, 1978).